

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara maksimal, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan (sustainability) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Penanggulangan kemiskinan selama ini telah ditangani melalui kebijakan dan mekanisme, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana (Irvan, 2010).

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau sebesar 11,22 persen. Jumlah ini bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yaitu sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada bulan Maret 2015. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76 persen pada bulan September 2014 menjadi 14,21 persen pada bulan Maret 2015. Persentase kemiskinan yang terjadi di daerah Sumatera Barat pada Tahun 2014 sebanyak 6,89 persen dan Tahun 2015 sebanyak 7,3 persen, artinya jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 0.42 persen (Badan Pusat Statistik, 2015).

Kemiskinan di pedesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (2015) permasalahan mendasar yang dihadapi petani hingga saat ini adalah kurangnya akses kepada sumber

permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri nampaknya masih sangat sulit untuk direalisasikan karena kompleksnya kendala dan masalah yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha tani untuk mencapai peningkatan produk. Masalah utama dalam menjalankan usaha ekonomi petani dalam sistem usaha agribisnis yaitu: (1) sulitnya masyarakat tani mengakses permodalan, dan (2) lemahnya modal masyarakat terutama masyarakat kategori miskin. Pengalaman juga menunjukkan bahwa dana bantuan selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak adanya lembaga yang mengelola keuangannya. Akibatnya sasaran dana bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sulit berkembang dan bahkan tidak tercapai. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan millenium. Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat (Permentan, 2015).

Program PUAP mencoba mengatasi masalah dana dengan cara menyalurkan dana kepada petani melalui kelompok tani/gapoktan. Dana PUAP pada prinsipnya hanya sebagai stimulus dalam menggerakkan usaha tani petani yang kemudian dikelola melalui Lembaga Keuangan Mikro. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif budidaya (*on-farm*) serta kegiatan non budidaya (*off-farm*), kemudian diharapkan dana BLM-PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (Permentan, 2015).

PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Gapoktan diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi perdesaan dengan menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu

unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan suatu lembaga mikro milik petani untuk pemberdayaan usaha produktif sektor pertanian dengan wilayah kerja nagari/kelurahan. Sebagai LKM milik petani secara struktural LKM-A berada dibawah naungan lembaga gapoktan (gabungan kelompok tani) dan secara fungsional LKM-A bersifat otonom khusus membiayai pembiayaan usaha produktif para petani. Tujuan umum pembentukan LKM-A adalah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usaha produktif sektor pertanian bagi petani (BPTP Sumbar, 2014).

Orientasi sosial sangat diutamakan dalam LKM-A, karena dengan adanya LKM-A diharapkan petani lebih mudah untuk memperoleh modal untuk membantu usaha mereka dan orientasi keuntungan tidaklah menjadi prioritas utama, diharapkan keberadaan LKM-A dapat meringankan beban petani. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat berbagai kendala yang dialami oleh LKM-A. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari pelayanan LKM-A dalam penyaluran dana PUAP cukup beragam dan seringkali dihadapkan dengan permasalahan kemacetan dalam pengembaliannya. Penelitian yang dilakukan oleh Singgih (2015) menunjukkan bahwa penyaluran dana PUAP pada LKMA mengalami kemacetan angsuran dari nasabahnya. Tan (2011) dalam Zanzes dkk (2015) menyebutkan bahwa wilayah Padang mengalami masalah dalam pengembalian dana PUAP yang telah diberikan kepada masyarakat.

Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan menjadi satu hal yang mendesak terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Menurut pedoman pengembangan LKM-A pada gapoktan PUAP (2014) sistem pembiayaan yang digunakan pada LKM-A dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani, yaitu pelayanan dan penyaluran sesuai dengan musim tanam. Sistem pembiayaan diharapkan mampu menumbuhkan *Capital Formation* melalui tabungan petani/kelompok tani yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan petani pada sumber pembiayaan dari pihak luar (perbankan). Penentuan sistem pelayanan diserahkan sepenuhnya kepada anggota, tentu dengan memilih sistem mana yang terbaik dan mudah dilaksanakan serta legalitasnya juga sudah ditentukan oleh pelaksana tersebut. Apabila efektivitas pembiayaan dapat dicapai maka akan berdampak positif bagi nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri.

Meningkatnya kesejahteraan nasabah melalui peningkatan kondisi usaha, peningkatan pendapatan nasabah, peningkatan nilai asset, mampu membuka usaha baru, peningkatan skala usaha, dan peningkatan konsumsi. Bagi lembaga keuangan yaitu terjaminnya keberlangsungan kegiatan pembiayaan karena perputaran modal lancar, sehingga penting kiranya topik analisis efektivitas pembiayaan pada lembaga keuangan mikro (LKM) untuk dikaji.

Efektivitas diartikan sebagai ketercapaian tujuan dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Menurut Steers dalam Khairul (2006) menyatakan efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumberdaya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu, serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya, dengan kata lain apabila sebuah institusi dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai sasaran, maka institusi tersebut dapat dikatakan efektif. Ratminto dan Atik dalam Wardani (2012) mengatakan efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Pengertian efektivitas dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan sistem pembiayaan untuk mencapai tujuan LKM-A.

B. Rumusan Masalah

LKM-A adalah salah satu unit usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP yang memberikan pinjaman modal untuk usaha produktif di bidang pertanian. Keberhasilan LKM-A juga tergantung pada keberhasilan petani dalam mengembangkan usaha produktif mereka, oleh karena itu sangat diharapkan petani mampu menciptakan peningkatan pada usaha mereka agar usaha yang dijalankan selama ini dapat berkembang. Tujuan umum pembentukan LKM-A adalah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usaha produktif sektor pertanian bagi petani. Pembentukan LKM-A secara khusus bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemudahan akses petani terhadap sumber pembiayaan usaha petani dan skim pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya, (2) meningkatkan produktivitas dan produksi usahatani/usaha ternak, usaha pengolahan hasil dan pemasaran dalam rangka mendorong

tercapainya nilai tambah, (3) mendorong percepatan pengembangan ekonomi pedesaan.

Sejak dimulainya program PUAP pada tahun 2008, pendirian LKM-A merupakan gagasan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, yang mana telah menjadi salah satu penyangga kuat permodalan petani di nagari-nagari di Sumatera Barat. Melalui dana PUAP yaitu Rp. 100.000.000,00 per Gapoktan, telah menjadi dana awal terbentuknya LKM-A yang dibentuk oleh Gapoktan di setiap nagari/kelurahan pelaksana PUAP. Jumlah LKM-A yang ada di Sumatera Barat pada Tahun 2008 sebanyak 204 LKM-A, bertambah menjadi 328 LKM-A pada Tahun 2009. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban PMT (Penyelia Mitra Tani) Sumatera Barat jumlah Gapoktan PUAP Tahun 2016 telah mencapai 1.037 unit dan jumlah LKM-A yang tumbuh sebanyak 1.037 unit dengan pertumbuhan asset selama delapan tahun ini yaitu 53,84%. Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah LKMA terbesar di Sumatera Barat (Lampiran 1)

Salah satu LKM-A yang aktif di kota Padang adalah LKM-A Saiyo Sakato yang berada di kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan kota Padang. LKM-A Saiyo Sakato terbentuk pada Tahun 2013. LKM-A ini merupakan LKM-A yang masih aktif dan dikategorikan LKM-A yang masih berkembang dengan asset yang dimiliki pada Februari 2016 mencapai Rp. 111.714.000 dan memiliki tingkat NPL (*Non Performing Loan*) 0%. Tingkat NPL yang mampu mencapai 0%, memperlihatkan bahwa LKM-A tersebut mampu mengelola nasabahnya sehingga dapat terhindar dari kredit macet dalam pengembalian dana pinjamannya. Berdasarkan data laporan Penyelia Mitra Tani (PMT) kota Padang ada dua LKM-A yang memiliki NPL 0% yaitu LKM-A Saiyo Sakato dan LKM-A Baringin Sakti. Pemilihan LKM-A Saiyo Sakato sebagai tempat penelitian karena LKM-A ini memiliki hari kerja tetap satu kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu dan pengelola LKM-A Saiyo Sakato bekerja fokus mengurus LKM-A. Sedangkan pengelola LKM-A Baringin Sakti tidak fokus mengurus LKM-A karena memiliki profesi lain yaitu sebagai guru, sehingga nasabah dilayani hanya ketika pengelola ada dirumah. Di sisi lain, kegiatan LKM-A Saiyo Sakato masih sederhana, hal tersebut terlihat dari belum adanya kantor yang memadai untuk

kegiatan pelayanan kepada nasabah. Jangkauan wilayah kerjanya yaitu kelurahan Padang Besi dengan perkembangan nasabah semenjak Tahun 2014 yang berjumlah 21 orang menjadi 80 orang pada tahun 2016. Menurut Barus (2009) apabila efektivitas pembiayaan dapat dicapai maka akan berdampak positif bagi nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri. Berdasarkan kondisi LKM-A Saiyo Sakato tersebut diasumsikan LKM-A Saiyo Sakato memiliki sistem yang baik dalam hal pengelolaannya. Ketercapaian efektivitas pada LKM-A Saiyo Sakato dapat diketahui dengan cara menanyakan persepsi nasabah terkait LKM-A Saiyo Sakato. Menurut Langevelt (1996) dalam Rahayu (2010) Persepsi berhubungan dengan pendapat dan penilaian individu terhadap suatu objek. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Persepsi Nasabah Terhadap Efektivitas Sistem Pembiayaan LKM-A Saiyo Sakato Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang**. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana sistem pembiayaan dalam akses permodalan yang dijalankan pada LKM-A Saiyo Sakato?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian Persepsi Nasabah Terhadap Efektivitas Sistem Pembiayaan LKM-A Saiyo Sakato Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ini adalah:

1. Mendeskripsikan profil LKM-A Saiyo Sakato Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
2. Menganalisis efektivitas sistem pembiayaan pada LKM-A Saiyo Sakato berdasarkan persepsi nasabah LKM-A Saiyo Sakato Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis

1. Manfaat praktis:

Bagi pengelola LKM-A, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalankan LKM-A untuk kedepannya dan bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil

keputusan dan implementasi dari kebijakan pemberdayaan ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Manfaat akademis:

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang lembaga keuangan mikro.

